

DAMPAK AGRESIVITAS CHINA DI LAUT CHINA SELATAN TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ASEAN

Putri Rizki Avrilia¹, Anton Aliabbas²

anton.aliabbas@paramadina.ac.id²

Universitas Paramadina

Abstrak: Dalam konteks geopolitik global, Laut China Selatan (LCS) telah menjadi fokus perhatian utama karena kompleksitasnya yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional. Konflik teritorial yang meliputi klaim atas wilayah maritim dan sumber daya alam telah memperumit situasi di kawasan tersebut, serta meningkatkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat, termasuk China dan beberapa negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak agresivitas China di Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik dengan ASEAN menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka analisis realisme ofensif Mearsheimer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, China memperkuat klaimnya dengan tindakan seperti pembangunan infrastruktur militer di pulau buatan dan penolakan terhadap putusan arbitrase PBB. Dampaknya terasa luas, mengganggu perdagangan dan hubungan bilateral dengan negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Respons Brunei Darussalam yang lebih kooperatif menunjukkan kompleksitas dinamika regional. Kekhawatiran tentang kekuatan militer China dan ketidakpastian terhadap niatnya mempengaruhi keamanan dan diplomasi di kawasan tersebut. Penyelesaian damai atas sengketa ini menantang, menuntut kerjasama multilateral dan penegakan hukum internasional.

Kata Kunci: Laut China Selatan (LCS), Geopolitik global, Konflik teritorial.

PENDAHULUAN

Masalah Laut China Selatan atau Laut China Selatan (LTS) merupakan perhatian utama dalam ranah geopolitik global. Salah satu permasalahan yang paling rumit adalah sengketa teritorial yang meliputi sengketa batas wilayah maritim yang memperumit situasi, termasuk klaim atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan hak-hak untuk melakukan eksploitasi sumber daya di perairan yang terbentang luas (Wiranto, 2016). Hingga saat ini, belum ada penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini, yang membuat situasi semakin kompleks dan menimbulkan potensi ketegangan yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi fokus perhatian internasional karena faktor-faktor kompleks yang mempengaruhi stabilitas dan keamanannya. Roza et al., (2013) menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan Laut China Selatan menjadi zona perairan yang berisiko mengalami konflik besar pada saat ini hingga di masa yang akan datang. Adanya persaingan yang intens atas sumber daya alam, terutama minyak dan energi lainnya, di tengah klaim yang saling bertentangan atas gugusan pulau oleh negara-negara seperti China, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sehingga menimbulkan ketegangan yang berpotensi memicu konflik. Selain itu, posisinya yang strategis sebagai jalur perlintasan kapal internasional yang penting, seperti Selat Malaka, menambah kompleksitas situasi, dengan kepentingan keamanan dari berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia-Pasifik, serta kepentingan eksternal seperti Amerika Serikat, semuanya saling terkait. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan, terutama China, juga memperkuat upaya untuk mengamankan kepentingan keamanan energi, menambah dinamika dalam persaingan geopolitik di Laut China Selatan.

Konflik yang semakin meningkat dan meluas di sekitar Laut China Selatan dimulai sejak tahun 2009 ketika China mengajukan peta barunya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peta tersebut didasarkan pada peta tahun 1947, yang menjadi awal dari usaha China dalam memetakan wilayah perairannya sendiri (Ruyat, 2017). Pembuatan peta ini bertumpu pada klaim atas sejarah wilayah tradisional penangkapan ikan yang diyakini dimiliki oleh masyarakat China. Garis-garis tersebut mencakup kepulauan penting seperti Kepulauan Spratly dan Paracel, serta Scarborough Shoal. China mengklaim sekitar 90% wilayah Laut China Selatan dengan peta nine dash line yang diajukan ke PBB pada 2009 (Mollman, 2016). Selain itu, klaim atas garis putus-putus memiliki tiga elemen, yaitu kedaulatan atas seluruh fitur yang ada, hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan berdasarkan UNCLOS, dan hak historis atas penangkapan ikan, navigasi, dan pengembangan sumber daya (Kanehara, 2018). Meskipun sudah ada sejak 1947, peta ini belum diakui secara internasional. Tidak ada konflik besar di wilayah tersebut hingga 2009, namun ketegangan meningkat saat China mendaftarkan klaimnya ke PBB, memicu perselisihan dengan negara lain. Hal tersebut menjadi kontroversi karena negara-negara ASEAN yang memiliki klaim atas wilayah ini, termasuk Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia, yang menentang upaya China tersebut.

Dalam situasi tegang di sekitar Laut China Selatan, ASEAN hadir sebagai organisasi regional yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, keamanan dan mengurangi konflik di Asia Tenggara. Sebagai forum dialog regional yang melibatkan sebagian besar negara-negara yang terlibat dalam sengketa tersebut, ASEAN telah bertindak sebagai mediator dan fasilitator. Melalui upayanya, ASEAN telah memfasilitasi dialog antara negara-negara terkait, merancang kerangka kerja hukum seperti Kode Etik di Laut China Selatan, dan mempromosikan prinsip-prinsip diplomasi serta penyelesaian konflik secara damai (Santoso, 2021). Peran dan usaha ASEAN dalam menangani sengketa di Laut China Selatan mencerminkan kompleksitas dinamika regional dan menegaskan pentingnya kerja sama multilateral dalam memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dampak agresivitas China di Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik dengan ASEAN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen resmi seperti pernyataan diplomatik, laporan kebijakan luar negeri, perjanjian regional, dan dokumen hukum internasional terkait Laut China, laporan media, dan penelitian terdahulu sebagai metode pengumpulan data utama. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis konten dengan menggunakan teori realisme ofensif Mearsheimer sebagai kerangka analisis, untuk mengidentifikasi pola perilaku agresif China dan dampaknya terhadap hubungan diplomatik dengan ASEAN. Analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola diskursif, dan perbedaan pandangan antara China dan negara-negara ASEAN dalam konteks konflik di Laut China Selatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laut China Selatan adalah perairan setengah tertutup yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, serta terletak di antara daratan Asia dan kepulauan sekitarnya. Di bagian utara, Laut China Selatan berbatasan dengan China dan Taiwan, sementara di barat hingga selatan, berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia Barat. Di sisi timur, berbatasan dengan Filipina, dan di bagian selatan, berbatasan dengan Indonesia Timur, Malaysia Timur, dan Brunei Darussalam. Letak posisi teritorial dan klaim kedaulatan yang kompleks antara negara-negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Beberapa negara memiliki klaim yang tumpang tindih atas wilayah-wilayah di laut tersebut, terutama terkait dengan kepemilikan pulau-pulau kecil dan sumber daya alam di bawahnya. Konflik ini telah menjadi sumber ketegangan regional yang signifikan, dengan isu-isu seperti keamanan maritim, kebebasan berlayar, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta penegakan hukum internasional menjadi pusat perdebatan dan sengketa di forum-forum diplomatik dan lembaga-lembaga internasional.

Pola Perilaku Agresif China

Thayer (2001) menjelaskan pada tahun 2010, terdapat tiga perkembangan utama yang memengaruhi keamanan regional di Asia Tenggara diantaranya, meningkatnya ketegangan dalam hubungan Sino-Amerika, kembalinya AS dan terlibat dengan wilayah tersebut, serta peningkatan agresivitas China di Laut China Selatan. Thayer juga menyatakan bahwa ada dua faktor utama yang mendasari tindakan China di Laut China Selatan, yaitu klaim kedaulatan dan potensi sumber daya hidrokarbon yang membuatnya menjadi wilayah yang menarik untuk penelitian dan pengembangan energi. Faktor-faktor ini telah memberikan landasan bagi pola perilaku agresif China dalam upaya memperkuat klaim teritorialnya dan memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya alam di Laut China Selatan. Tindakan agresif tersebut termasuk pembangunan infrastruktur militer di pulau-pulau buatan, peningkatan patroli maritim, dan penolakan terhadap putusan arbitrase yang menguntungkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (Prawira Utama, 2020). Hal ini juga memicu respons dari Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk peningkatan kehadiran militer dan pelaksanaan latihan bersama di wilayah tersebut (Koesetianto et al., 2024). Dinamika di Laut China Selatan terus berkembang, dan cara penyelesaian konflik ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi stabilitas keamanan dan ekonomi global. Persaingan kekuatan di kawasan ini tidak hanya merupakan isu bilateral antara AS dan China, tetapi juga merupakan permasalahan multilateral yang melibatkan sejumlah besar negara dan kepentingan yang saling bersaing. Upaya-upaya diplomatik dan mediasi internasional telah dilakukan untuk meredakan ketegangan di wilayah tersebut, namun seringkali gagal mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian yang berkelanjutan atas sengketa di Laut China Selatan masih menjadi tantangan besar bagi komunitas internasional.

Dampak Agresivitas China terhadap Hubungan Diplomatik dengan ASEAN

Pertumbuhan kekuatan China dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi fokus perhatian global, khususnya dalam hubungannya dengan kawasan Asia Tenggara yang diwakili oleh ASEAN.

Agresivitas yang semakin meningkat dari China, terutama dalam konteks klaim teritorial di Laut China Selatan, telah memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika hubungan diplomatik antara China dan negara-negara ASEAN. Hal ini menciptakan ketegangan yang meningkat dan memperumit proses diplomasi di kawasan tersebut, mempengaruhi persepsi dan kebijakan negara-negara ASEAN terhadap China, serta memperumit upaya untuk mencapai konsensus dalam isu-isu penting seperti pembagian sumber daya laut, keamanan maritim, dan pembangunan ekonomi regional. Berikut ini merupakan negara-negara yang mengalami dampak dari tindakan China mengenai Laut China Selatan:

Indonesia yang menjadi salah satu negara ASEAN, telah mengalami dampak ekonomi yang dirasakan akibat konflik di wilayah perairan Laut China Selatan mencakup berbagai sektor, terutama ekspor dan impor (Djuyandi et al., 2021). Wilayah perairan tersebut merupakan jalur vital bagi arus barang ke dan dari Indonesia. Ketika konflik terjadi di sana, pembatasan wilayah menjadi tak terhindarkan. Kapal-kapal yang membawa barang ekspor dan impor Indonesia akan menghadapi kesulitan besar untuk melewati area tersebut. Pembatasan ini akan mengganggu alur perdagangan, mengakibatkan penundaan dalam pengiriman barang, peningkatan biaya logistik, dan bahkan kemungkinan penurunan volume perdagangan secara keseluruhan. Hal ini akan memberikan dampak negatif yang signifikan pada perekonomian Indonesia yang bergantung pada ekspor dan impor.

Situasi di Laut China Selatan memengaruhi hubungan diplomatik antara China dan Malaysia secara signifikan. Laut China Selatan memiliki peran penting sebagai jalur perdagangan maritim dan kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas alam. Klaim yang bersaing atas wilayah ini antara China dan beberapa negara, termasuk Malaysia, telah menyebabkan ketegangan dan konflik. China telah memperluas klaimnya dengan membangun pulau buatan dan instalasi militer, menimbulkan perhatian negara-negara lain di kawasan tersebut. Reuters dalam VOA Indonesia (2023) menuliskan bahwa pernyataan Malaysia, yang diwakili oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kementerian Luar Negeri, menegaskan komitmen mereka untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan Malaysia di wilayah tersebut. China telah mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan dengan mengacu pada sembilan garis putus-putus, yang ditolak oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016. Aktivitas proyek energi Malaysia, khususnya yang dilakukan oleh perusahaan migas negara Petronas, telah menarik perhatian China. Meskipun Anwar Ibrahim menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dengan China, tindakannya menuai kritik dari pihak oposisi, yang menganggapnya mempertaruhkan kedaulatan negara. Namun, Malaysia menekankan penyelesaian masalah ini secara damai tanpa mengorbankan posisi negara. Konflik antara Malaysia dan China mencerminkan ketegangan lebih luas di wilayah tersebut, memperumit hubungan regional dan menimbulkan kekhawatiran atas stabilitas politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Malaysia, bersama negara-negara tetangga, prihatin akan klaim agresif China yang berpotensi mengancam kedaulatan dan hak maritim mereka di Laut China Selatan. Oleh karena itu, Malaysia menegaskan kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan dan mendukung penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional, seperti UNCLOS.

Dampak diplomatik dari sengketa Laut China Selatan juga dirasakan oleh China dan Filipina yang mencakup ketegangan bilateral, pengaruh terhadap forum regional seperti ASEAN, dan upaya penyelesaian sengketa melalui diplomasi bilateral. Mahabbah (2023) memaparkan bahwa ketegangan dalam hubungan bilateral tercermin dalam tindakan agresif, seperti penembakan laser militer oleh kapal patroli China terhadap kapal patroli Filipina. Selain itu, tindakan agresif China di Laut China Selatan, termasuk penggunaan meriam air dan perangkat akustik jarak jauh terhadap kapal Penjaga Pantai Filipina, serta gangguan terhadap kapal-kapal Filipina yang melakukan misi suplai resmi, telah menyebabkan kerusakan pada hubungan diplomatik antara China dan Filipina (Lisbet, 2023). Di tingkat regional, sengketa ini mempengaruhi dinamika ASEAN, yang berupaya memediasi konflik namun seringkali terkendala oleh perbedaan pendapat antara negara-negara anggota,

termasuk Filipina dan China. Penyelesaian sengketa Laut China Selatan secara damai menjadi fokus dalam diplomasi bilateral antara kedua negara, tetapi hasilnya belum mencapai titik kesepakatan yang memuaskan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sambil memperhatikan kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing. Dampak ini menciptakan berlanjutnya ketegangan antara Filipina dan China berpotensi menyebabkan pemulangan Duta Besar China dari Filipina, sebab Pemerintah Filipina telah memanggil Huang Xilian, Duta Besar China untuk Filipina (Lisbet, 2023). Selama masa kepemimpinan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan menentang langkah-langkah China. Filipina mendapatkan dukungan dari AS dalam menghadapi tindakan berbahaya dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh China.

Ketegangan dan konfrontasi juga terjadi dalam diplomatik antara China dan Vietnam karena adanya keberadaan Laut China Selatan. Vietnam menegaskan klaimnya atas wilayah laut tersebut berdasarkan hukum internasional dan ketentuan historis, yang menyebabkan perselisihan dengan China yang juga mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan (Ariansah et al., 2023). Konflik interpretasi wilayah, seperti yang terjadi dalam kasus Paracel dan Spratly, telah menyebabkan ketegangan diplomatik yang meningkat, terutama ketika China melakukan tindakan-tindakan yang dianggap ilegal atau provokatif, seperti pengiriman kapal survei Haiyang Dizhi 8 ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam (Anthoni, 2019). Reaksi Vietnam terhadap tindakan China termasuk protes diplomatik dan peningkatan mobilitasi kekuatan militer, yang memperumit hubungan bilateral antara kedua negara dan mempengaruhi dinamika diplomasi regional di Asia Tenggara.

Sebaliknya, dampak Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik antara China dan Brunei Darussalam adalah bahwa Brunei cenderung mengambil sikap yang lebih kooperatif dan tidak menentang klaim China atas wilayah laut tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bimo & Purwantoro (2020) bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Brunei diantaranya, pertimbangan atas kelemahan relatif Brunei dalam hal ekonomi dan militer jika dibandingkan dengan China, serta krisis ekonomi yang dihadapi oleh Brunei akibat penurunan harga minyak dunia. Dalam penelitiannya, Bimo & Purwantoro (2020) juga memaparkan bahwa Brunei memandang upaya untuk melawan klaim China dalam sengketa Laut China Selatan bisa menjadi pilihan yang sangat tidak bijak, mengingat kekuatan militer China yang jauh lebih besar daripada Brunei, maupun negara-negara tetangga lainnya yang terdampak seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Sebagai gantinya, Brunei lebih memilih untuk menjalin hubungan yang kooperatif dengan China (Marboen, 2013). Hal ini tercermin dalam kesepakatan kerjasama bilateral antara Xi Jinping dan Sultan Hassanal Bolkiah pada tahun 2018 (Saputra, 2018). Kesepakatan tersebut, yang mencakup bidang perdagangan, investasi, dan proyek infrastruktur, merupakan contoh dari strategi bandwagoning yang diambil oleh Brunei, di mana negara tersebut memilih untuk bekerja sama dengan negara yang lebih kuat daripada menentangnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun terlibat dalam konflik di Laut China Selatan, Brunei memilih untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan China demi kepentingan ekonomi dan keamanan jangka panjang.

Melihat fenomena dan kondisi diatas, dampak dari pertumbuhan kekuatan China dan klaim teritorialnya di Laut China Selatan telah menyebabkan gejolak diplomatik yang meluas di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam telah merasakan dampaknya melalui gangguan ekonomi dan ketegangan diplomatik. Ketegangan ini juga memengaruhi upaya ASEAN dalam mencapai konsensus dan memperumit hubungan bilateral antara China dan negara-negara anggota ASEAN. Namun, respons yang beragam terhadap klaim China terlihat dalam sikap Brunei, yang cenderung mengambil pendekatan kooperatif untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan China demi kepentingan ekonomi dan keamanan jangka panjang.

Dengan demikian, situasi kompleks di Laut China Selatan membutuhkan upaya bersama untuk mencapai penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional serta mempromosikan kerjasama regional yang berkelanjutan.

Perspektif Realisme Ofensif Mearsheimer dalam Hubungan China dan ASEAN

Terdapat lima asumsi yang dibahas dalam bagian ini, berikut kelima asumsi tersebut:

1. Sistem Internasional yang Anarkis

Fenomena ini mengacu pada kondisi di mana tidak ada otoritas pusat yang mengatur atau mengendalikan interaksi antara negara-negara. Dalam sistem internasional yang anarkis, tidak ada jaminan keamanan kolektif, sehingga setiap negara harus mengandalkan kemampuan relatifnya sendiri untuk melindungi kepentingan dan keamanannya. Ironisnya, upaya-upaya ini seringkali menciptakan dinamika yang justru mengancam stabilitas dunia, karena persaingan dan ketegangan antarnegara dapat meningkatkan risiko konflik dan ketidakstabilan global (Bakhtiar Darmawan, 2017).

Dalam kondisi konflik Laut China Selatan, kawasan tersebut merupakan arena yang dipengaruhi oleh anarki ini. Anarki ini merujuk pada kurangnya otoritas sentral atau pemerintahan yang dapat mengatur hubungan antara negara-negara yang terlibat. Kawasan tersebut dipengaruhi oleh anarki dalam arti bahwa tidak ada entitas tunggal yang memiliki kekuatan atau wewenang mutlak untuk mengontrol atau menyelesaikan sengketa yang muncul di antara negara-negara yang berbagi kepentingan di kawasan tersebut. Meskipun PBB dan ASEAN terlibat dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, keterlibatan mereka dibatasi oleh kompleksitas politik, kepentingan nasional, dan keterbatasan kekuasaan yang melekat dalam sistem internasional.

Keputusan yang menguntungkan Filipina dalam perselisihan klaim sembilan garis putus-putus China atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah diberikan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional (BBC, 2016). Namun, penolakan terbuka oleh China terhadap keputusan arbitrase tersebut telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Peran penting PBB dalam mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai tercermin dalam United Nations Convention on the Law of the Seas (UNCLOS). UNCLOS memberikan landasan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk melalui arbitrase dan mediasi. Namun, sebagaimana telah diindikasikan, UNCLOS tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat, dan PBB terbatas dalam menangani konflik teritorial yang melibatkan negara-negara besar (Andrian & Ras, 2022). Tantangan utamanya terletak pada ketidakmampuan PBB untuk menghasilkan resolusi yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama karena hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Andrian & Ras, 2022; Dursin, 2016).

Dalam kasus Laut Cina Selatan, ketika Dewan Keamanan tidak dapat mencapai kesepakatan karena veto China, hal ini mencerminkan kompleksitas politik yang melibatkan kepentingan negara-negara besar di kawasan tersebut. Selain itu, negara-negara memiliki kedaulatan yang diakui secara internasional, yang berarti bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan kebijakan dan tindakan mereka sendiri dalam konteks sengketa wilayah. Sebagai gantinya, setiap negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri, tanpa ada aturan yang sama-sama diterima oleh semua pihak. Dalam sistem internasional yang anarkis, kekuatan dan keamanan negara-negara ditentukan oleh seberapa kuat mereka secara militer dan politik. China, sebagai negara yang memiliki kekuatan besar di kawasan tersebut, memiliki pengaruh yang signifikan atas dinamika konflik di Laut China Selatan. Kekuatan militer dan ekonominya yang besar memberikan China keunggulan relatif atas negara-negara ASEAN lainnya, yang mungkin merasa tidak mampu untuk menghadapi China secara langsung dalam konflik.

Kondisi anarkis ini juga menciptakan lingkungan di mana negara-negara kecil cenderung mencari perlindungan atau aliansi dengan kekuatan besar, seperti Amerika Serikat, untuk memperkuat posisi mereka dalam konflik. Hal ini menghasilkan dinamika yang kompleks di

kawasan tersebut, di mana permainan kekuasaan antara negara-negara besar dan kecil mempengaruhi strategi dan tindakan masing-masing aktor. Dampak dari sistem internasional yang anarkis ini terlihat dalam ketidakpastian dan ketegangan yang terus-menerus di Laut China Selatan. Negara-negara ASEAN merasa terjebak dalam situasi di mana mereka harus berhadapan dengan klaim agresif China atas wilayah tersebut tanpa ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketidakpastian tentang niat China dan kekhawatiran akan ancaman terhadap kedaulatan nasional memperumit upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

2. Kekuatan Militer China adalah Ancaman ASEAN

Perspektif realisme ofensif Mearsheimer, yang menyatakan bahwa kekuatan besar memiliki kemampuan militer yang bersifat ofensif, menggambarkan bagaimana negara-negara besar, seperti China, yang cenderung menggunakan kekuatan militernya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis mereka. Dalam konflik Laut China Selatan, analisis ini dapat diterapkan untuk memahami tindakan China dalam memperluas klaim teritorialnya di wilayah tersebut.

Pertama-tama, China telah menunjukkan keberhasilannya dalam membangun dan meningkatkan kehadiran militer di Laut China Selatan (Sachiyu, 2023). Langkah-langkah ini termasuk pembangunan pulau buatan yang dilengkapi dengan landasan udara dan instalasi militer, serta penempatan kapal patroli dan pesawat tempur di wilayah tersebut. Dengan demikian, China memiliki kemampuan militer yang signifikan di wilayah Laut China Selatan, yang dapat digunakan untuk menegakkan klaimnya dan memengaruhi dinamika keamanan di kawasan tersebut. Selanjutnya, China telah menggunakan kekuatan militernya secara aktif untuk menunjukkan kedaulatannya atas wilayah yang disengketakan. Tindakan agresif seperti penegakan kedaulatan dengan menggunakan kapal patroli, menghalangi kapal-kapal asing untuk mengakses wilayah tertentu, dan mengganggu operasi eksplorasi sumber daya alam oleh negara-negara tetangga merupakan contoh bagaimana kekuatan militernya digunakan secara ofensif untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan strategis (BBC, 2024; Rachman, 2023; VOA, 2023). Selain itu, China juga menggunakan kekuatan militernya untuk mempengaruhi keputusan politik negara-negara tetangga di wilayah tersebut. Melalui intimidasi militer dan demonstrasi kekuatan, China berusaha untuk membujuk negara-negara ASEAN dan lainnya agar menerima klaimnya atas Laut China Selatan atau setidaknya untuk tidak mengambil tindakan yang dapat mengganggu kepentingan China di wilayah tersebut (Natalia, 2024).

Dampak dari kekuatan militernya yang bersifat ofensif juga dapat dilihat dalam ketegangan dan konfrontasi yang terjadi antara China dan negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Tindakan China yang agresif sering kali memicu respons militer dari negara-negara tetangga, meningkatkan risiko terjadinya eskalasi konflik dan memperumit upaya untuk mencapai penyelesaian damai. Selain itu, kekuatan militernya yang bersifat ofensif juga memengaruhi dinamika diplomasi regional di kawasan tersebut. Negara-negara ASEAN dan lainnya merasa perlu untuk merespons langkah-langkah agresif China dengan menguatkan kerjasama keamanan regional dan mencari dukungan dari negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat, atau organisasi internasional untuk menyeimbangkan kekuatan China atau menjadi mediator di kawasan tersebut.

3. Ketidakpastian Terhadap Kapabilitas China

Ketidakpastian tentang niat negara lain merupakan salah satu asumsi dasar dalam teori realisme ofensif, dan hal ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku negara-negara dalam konteks konflik dan persaingan geopolitik. Dalam konflik Laut China Selatan, ketidakpastian tentang niat China menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika hubungan antara China dan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan mereka atas wilayah maritim dan sumber daya alam di Laut China Selatan. Namun, klaim yang bersaing dari China atas sebagian besar wilayah ini menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di antara

negara-negara ASEAN tentang niat sebenarnya dari China.

Ketidakpastian tentang niat China terutama muncul dalam dua aspek. Pertama, negara-negara ASEAN tidak dapat memastikan apakah China akan menggunakan kekuatan militer secara agresif untuk memperluas klaimnya atau untuk mencapai solusi diplomatik yang menguntungkan kedua belah pihak. Kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik militer di Laut China Selatan menjadi salah satu faktor yang mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kewaspadaan militer mereka dan mencari dukungan dari mitra internasional, seperti Amerika Serikat dan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik (Corcinibuyanaya, 2024). Kedua, ketidakpastian tentang niat China juga menciptakan kekhawatiran dunia tentang tujuan jangka panjang dari ekspansi maritim China di Laut China Selatan (Marboen, 2016). Negara-negara ASEAN khawatir bahwa klaim teritorial yang semakin agresif dari China dapat mengancam kedaulatan mereka atas wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam dan jalur perdagangan penting. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa China dapat menggunakan klaimnya atas Laut China Selatan sebagai landasan untuk memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan tersebut, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan regional.

Melihat kondisi ini, ketidakpastian tentang niat China menciptakan lingkungan strategis yang kompleks dan tidak stabil di Laut China Selatan. Negara-negara ASEAN merasa perlu untuk menjaga kewaspadaan tinggi dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi klaim teritorial yang semakin agresif dari China. Selain itu, ketidakpastian ini juga memperumit upaya untuk mencapai penyelesaian damai atas konflik Laut China Selatan, karena negara-negara ASEAN tidak dapat memastikan apakah China akan bersedia untuk berunding secara konstruktif atau akan terus mengambil langkah-langkah unilateral yang meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

4. Kelangsungan Hidup sebagai Tujuan Utama

Dalam realisme ofensif, kelangsungan hidup dipandang sebagai prioritas utama bagi negara-negara besar, yang sering kali mendorong mereka untuk mengambil tindakan agresif atau ofensif untuk mempertahankan diri dan memastikan keberlangsungan negara mereka. Dalam konflik Laut China Selatan, kedua belah pihak, yaitu China dan negara-negara ASEAN, memiliki kepentingan yang kuat dalam memastikan kedaulatan dan keamanan nasional mereka di wilayah tersebut.

Bagi China, Laut China Selatan memiliki nilai strategis yang besar. Wilayah ini bukan hanya merupakan jalur maritim penting untuk perdagangan internasional, tetapi juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan ikan. Dengan memperluas klaim teritorialnya di Laut China Selatan melalui pembangunan pulau buatan dan instalasi militer, China berusaha untuk memperkuat kontrolnya atas wilayah tersebut demi melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasionalnya (Arbar, 2020). China memiliki ketertarikan di Kepulauan Spratly dan Paracel, yang tidak hanya bertujuan untuk mendukung program modernisasi mereka tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan Taiwan (Harini, 2011). China percaya bahwa memperluas kontrolnya atas Laut China Selatan akan meningkatkan daya tawar negaranya dalam hal keamanan energi, pertahanan maritim, dan pengaruh geopolitik di kawasan tersebut. Oleh karena itu, tindakan agresif China dalam konflik Laut China Selatan dapat dipahami sebagai strategi untuk memastikan kelangsungan hidup negara tersebut dalam jangka panjang.

Di sisi lain, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga menganggap kedaulatan dan keamanan nasional mereka di Laut China Selatan sebagai prioritas utama. Wilayah ini bukan hanya merupakan sumber daya ekonomi yang penting bagi negara-negara tersebut, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas dan keberlanjutan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, tindakan agresif China dalam klaim teritorial di Laut China Selatan dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN merasa perlu untuk menentang klaim agresif China dan mempertahankan hak-hak mereka atas wilayah laut tersebut demi memastikan kelangsungan hidup dan keamanan

nasional mereka.

Ketegangan dan konfrontasi antara China dan negara-negara ASEAN di Laut China Selatan dapat dipahami sebagai hasil dari persaingan antara kepentingan nasional yang saling bertentangan, di mana setiap pihak berusaha untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanan nasionalnya sendiri. Hal ini menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan potensi konflik, karena kedua belah pihak cenderung untuk mengambil langkah-langkah ofensif dalam upaya untuk memperkuat posisi mereka di kawasan tersebut.

5. Kekuatan Besar Bertindak secara Rasional

Rasional mengacu pada keputusan dan tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang masuk akal tentang risiko dan manfaat. Baik China maupun negara-negara ASEAN di Laut China Selatan memiliki kepentingan nasional yang beragam, termasuk keamanan, kedaulatan, dan ekonomi. Dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan ini, mereka secara rasional akan mengevaluasi situasi dan mengambil langkah-langkah yang mereka percayai akan menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

China, sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut, dianggap bertindak secara rasional dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Pembangunan pulau buatan dan instalasi militer di Laut China Selatan, serta klaim teritorial yang diperluas, dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang didasarkan pada perhitungan rasional untuk memperkuat kedaulatan China atas wilayah tersebut dan menjamin akses ke sumber daya alam yang kaya di bawahnya. Selain itu, China juga dapat memperhitungkan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari kontrol lebih besar atas jalur perdagangan maritim di kawasan tersebut.

Di sisi lain, negara-negara ASEAN juga bertindak secara rasional dalam mengejar kepentingan nasional mereka. Mereka mungkin menilai bahwa penyebaran klaim China atas Laut China Selatan mengancam kedaulatan dan keamanan mereka, serta mengganggu stabilitas regional. Oleh karena itu, mereka dapat mengambil langkah-langkah diplomatik untuk memperkuat posisi mereka dan melindungi kepentingan nasional, termasuk dengan mendekati mitra-mitra internasional untuk mendukung klaim mereka (Suharman, 2019). Namun, dalam ketidakpastian tentang niat dan tindakan pihak lain, langkah-langkah yang diambil oleh China dan negara-negara ASEAN mungkin memperumit situasi dan memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Mereka saling mencurigai dan mengantisipasi tindakan ofensif dari pihak lain, yang dapat mengakibatkan spiral ketegangan dan konflik yang lebih besar.

Tujuan Utama China adalah Ambisi Regional

Ambisi China dalam mengklaim dan menguasai perairan Laut China Selatan (LCS) dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas pengaruh regional. Dengan klaim yang didasarkan pada sembilan garis putus-putus, China mencoba mengamankan kepentingan strategis mereka dalam hal keamanan nasional dan ekonomi. Pertama, kontrol atas LCS memberikan China akses langsung ke jalur patroli strategis SSBN mereka, yang penting untuk menjaga pencegahan nuklir terhadap AS (Arbar, 2020, 2021). Selain itu, LCS juga merupakan jalur transportasi laut yang vital bagi perdagangan maritim global, serta sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan ikan. Dengan mengklaim wilayah ini, China memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan meningkatkan daya tawar ekonominya. Selain itu, klaim atas Laut China Selatan juga menegaskan ambisi China untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia-Pasifik, memperluas pengaruh politik dan ekonominya di sekitar wilayah tersebut. Sengketa ini juga mencerminkan persaingan global antara China dan AS untuk dominasi regional, dengan potensi dampak yang luas terhadap stabilitas dan keamanan global.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konflik di Laut China Selatan merupakan sumber ketegangan regional yang signifikan dengan dampak yang meluas terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Klaim teritorial yang tumpang tindih, agresivitas China dalam memperluas pengaruhnya, serta respons yang beragam dari negara-negara ASEAN menciptakan lingkungan yang kompleks dan tidak stabil di wilayah tersebut.

Dari perspektif realisme ofensif Mearsheimer, konflik ini dapat dipahami sebagai hasil dari persaingan kekuatan antara China sebagai kekuatan besar dan negara-negara ASEAN sebagai kekuatan regional. China menggunakan kekuatan militer dan ekonominya untuk memperluas klaim teritorialnya di Laut China Selatan dalam upaya untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanan nasionalnya. Di sisi lain, negara-negara ASEAN merasa perlu untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional mereka melawan klaim agresif China. Kedua belah pihak bertindak secara rasional sesuai dengan kepentingan nasional mereka, namun ketidakpastian tentang niat dan tindakan pihak lain memperumit upaya untuk mencapai penyelesaian damai.

Dampak konflik ini terasa luas, termasuk gangguan ekonomi, ketegangan diplomatik, dan ketidakpastian keamanan. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam merasakan dampaknya melalui pembatasan perdagangan dan ketegangan diplomatik. Di sisi lain, Brunei Darussalam cenderung mengambil pendekatan kooperatif dalam hubungannya dengan China untuk menjaga kepentingan ekonomi dan keamanan jangka panjang. Untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Diplomasi bilateral dan multilateral, dukungan internasional, serta penegakan hukum internasional berpotensi menjadi instrumen penting dalam mengatasi konflik ini. Upaya untuk mempromosikan kerjasama regional yang berkelanjutan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, R. M., & Ras, A. R. (2022). Dinamika Laut Cina Selatan dalam Perspektif Realisme Dunia Internasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8720–8727.
- Anthoni, M. (2019). Vietnam masih tempuh jalur diplomasi hadapi China di LCS. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/989906/vietnam-masih-tempuh-jalur-diplomasi-hadapi-china-di-lcs>
- Arbar, T. F. (2020). 3 Alasan Mengapa China Klaim Laut China Selatan. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200724161343-4-175213/3-alasan-mengapa-china-klaim-laut-china-selatan>
- Arbar, T. F. (2021). Tiga Alasan Utama China di Laut China Selatan. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210311081940-4-229414/tiga-alasan-utama-china-di-laut-china-selatan>
- Ariansah, F., Malik, F. A., Saphira, M., Erviana, V., & Antoni, H. (2023). Konflik antara China dengan Vietnam atas Laut China Selatan Berdasarkan Perspektif Hukum Laut Internasional. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 518. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.518-528>
- Bakhtiar Darmawan, A. (2017). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61100>
- BBC. (2016). Filipina rayakan kemenangan atas kasus Laut Cina Selatan dengan “Chexit.” *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160712_trensosial_filipina_chexit
- BBC. (2024). “Kami dapat melihat wajah mereka dari jarak dekat” - Kesaksian wartawan BBC menumpang kapal Filipina dan dikejar kapal patroli China. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czq5y8x15j7o>
- Bimo, Y., & Purwanto, Y. (2020). Bandwagoning Brunei Darussalam terhadap Republik Rakyat Cina pada tahun 2018 dalam konflik Laut Cina Selatan. *Indonesian Journal of International Relations*, 4(1), 1–

24.

- Corcinibuyanaya, A. (2024, April 13). Ancaman Konflik di Laut China terhadap Kedaulatan Indonesia Selatan. *Kompasiana*.
<https://www.kompasiana.com/andreas90837/661a73051470935187351522/ancaman-konflik-di-laut-china-terhadap-kedaulatan-indonesia-selatan>
- Djuyandi, Y., Illahi, A. Q., & Aurel, A. C. H. (2021). Konflik Laut China Selatan Serta Dampaknya Atas Hubungan Sipil Militer Di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 5(1), 112. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.112-124>
- Dursin, K. (2016). Pakar: China tidak bisa dipaksa menerima keputusan arbitrase. *Rappler.Com*.
<https://www.rappler.com/indonesia/139692-pakar-china-tidak-bisa-dipaksa-menerima-keputusan-arbitrase>
- Harini, S. (2011). Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Universitas Slamet Riyadi*, 14(21), 43–50. <http://bataviase.co.id/node/354962>
- Johnson, D. D. P., & Thayer, B. A. (2016). The Evolution of Offensive Realism: Survival under Anarchy from the Pleistocene to the Present. *Politics and the Life Sciences*, 35(1), 1–26.
<https://doi.org/10.1017/pls.2016.6>
- Kanehara, A. (2018). Validity of International Law over Historic Rights: The Arbitral Award (Merits) on the South China Sea Dispute. *Japan Review*, 2(3), 1–37.
- Koesetianto, B. B., Nugroho, B. A., Syarifuddin, K. F., Susilawati, S., Supriyanto, T., Wiyono, W., Yusgiantoro, P., & Midhio, I. W. (2024). Strategi Keamanan Nasional Republik Indonesia Menghadapi Rivalitas Amerika Serikat - China di Laut China Selatan. *Journal on Education*, 6(2), 12694–12711. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.5094>
- Lisbet. (2023). Ketegangan Filipina Dan China Di Laut China Selatan Serta Upaya Asean Dalam Mengatasinya. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, XV(24).
- Mahabbah, K. D. (2023). Konflik Baru Filipina-China di Laut China Selatan Bisa Mengganggu Keamanan Wilayah Asia Tenggara. *Universitas Muhammadiyah Malang*, 4–5. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/memox/konflik-baru-filipinachina-di-laut-china-selatan-bisa-mengganggu-keamanan-wilayah-asia-tenggara.html>
- Marboen, A. P. (2013). Brunei-China Bahas Hubungan Bilateral. *Antara News*.
<https://www.antaraneews.com/berita/373071/brunei-china-bahas-hubungan-bilateral>
- Marboen, A. P. (2016, April 25). Jepang Sebut Ekspansi Maritim China Khawatirkan Dunia. *Antara News*.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. In W.W Norton & Company (1st Editio). W.W Norton & Company. <https://doi.org/10.2307/798192>
- Mollman, S. (2016, July 7). The line on a 70-year-old map that threatens to set off a war in East Asia. *Quartz*.
<https://qz.com/705223/where-exactly-did-chinas-nine-dash-line-in-the-south-china-sea-come-from>
- Natalia, D. L. (2024). China janji lanjutkan negosiasi Laut China Selatan dengan negara ASEAN. *Antara News*.
- Prawira Utama, M. D. (2020). Intervensi Negara Ketiga Dan Peran Indonesia Bersama Asean Pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan. *Jurnal Dinamika Global*, 4(02), 329–346.
<https://doi.org/10.36859/jdg.v4i02.136>
- Rachman, A. (2023). Kapal China Berkerumun di Wilayah Sengketa Laut Cina Selatan. *Alinea.Id*.
- Reuters. (2023, April 8). Malaysia Tegaskan akan Lindungi Haknya di Laut China Selatan. *VOA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/amp/malaysia-tegaskan-akan-lindungi-haknya-di-laut-china-selatan/7042049.html>
- Roza, R., Nainggolan, P. P., & Muhamad, S. V. (2013). Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)*.
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-25.pdf
- Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhannas*, 29, 67–75.
- Sachiyo, S. (2023). Cina & Vietnam Percepat Pengembangan Laut Cina Selatan Seiring Meningkatnya Sengketa. *NHK*. <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/backstories/2920/>
- Santoso, S. P. (2021). Percaturan Geopolitik Kawasan Laut China Selatan. In *Deepublish (Cetakan Pe)*. Dee Publish.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IvI3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22indonesia%22+%22amerika%22+%22tiongkok%22+%22rivalitas%22&ots=iDEV4OYnUs&sig=t0S2Ba-Kdmsm0Ajv2v84W_BZy8s

Saputra, E. Y. (2018, November 19). Kunjungi Brunei Darussalam, Xi Jinping Perkuat Kerja Sama Ekonomi. Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co/read/1147802/kunjungi-brunei-darussalam-xi-jinping-perkuat-kerja-sama-ekonomi>

Suharman, Y. (2019). Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 127. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3>

Thayer, C. A. (2001). The United States and South-East Asia. *Southeast Asian Affairs*, 16–25. https://doi.org/10.7218/nenpouseijigaku1953.5.0_127

VOA. (2023). China Klaim Usir Kapal AL Filipina dari Laut China Selatan. VOA Indonesia.

Wiranto, S. (2016). Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional (Cetakan Pe). PT Leutica Nouvelitera.